

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
AKSESIBILITAS INFORMASI DESA DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten
Pemalang)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Akuntansi Syariah



Oleh :

TRI YULI ASTUTI

NIM. 1505046034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Tri Yuli Astuti

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Tri Yuli Astuti

NIM : 1505046034

Judul Skripsi : **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Rahman El Junusi, S.E., M.M

NIP. 19691118 200003 1 001

Semarang, 19 Juli 2019

Pembimbing II



Nurudin, SE., M.M

NIP. 19900523 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id*

PENGESAHAN

Nama : Tri Yuli Astuti
NIM :1505046034
Fakultas/Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah
Judul : **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

30 Juli 2019

Dan dapat diterima, sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Semarang, 1 Agustus 2019

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,

H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji I,

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 19700321 199603 1 003

Pembimbing I,

Rahman El-Junusi S.E., MM
NIP. 19691118 200003 1 001

Sekretaris,

Rahman El-Junusi S.E., M.M.
NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji II,

Dr. Ari Kristin P., M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II,

Nurudin, S.E., M.M
NIP. 19900523 201503 1 004

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya” (surat Al-Muddatstsir,74 :38)

If there is a will there is a way – *author*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, ku persembahkan karya
ini untuk :

Kedua orang tua, Bapak Sohirin dan Ibu Raden Roro Puji Astuti yang
tersayang, Terimakasih atas dukungan kasih sayang dan doa yang
tidak pernah terputus, serta kerja keras tiada henti.

Teruntuk kakak-kakaku tercinta Iin Karlina dan Fitri Nurjannah,
terimakasih atas semangat dan doa yang terus mengalir.

Teman teman Akuntansi Syariah angkatan 2015,
serta Almamaterku Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Yang selalu memberikan motivasi dan semangat

Terimakasih

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 26 Juli 2019

Deklarator



Tri Yuli Astuti

1505046034

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lengkap dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Sehingga, untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي .. َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و .. َ	fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي .. َ ا .. َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي .. ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و .. ُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

E. Syaddah (*tasydid*)

\Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

F. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشفَاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : القلم : al-qalamu

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan secara mandiri. Kebijakan tersebut diharapkan pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 42 responden. Sampel terdiri dari Kepala Dusun, RT, RW dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dengan pengujian hipotesis dilakukan dengan Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, apabila semakin baik penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang akan semakin baik.

Kata Kunci : *Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.*

ABSTRACT

The Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning villages, provides a great opportunity for villages to regulate governance independently. The policy is expected that the village government must apply the principle of accountability to account for it to the community. This research aimed to determine the effect of financial statements presentation, village information accessibility and society participation in the accountability of village financial management in Danasari Village, Pemalang District, Pemalang Regency.

The research used quantitative methods with the total sample of 42 respondents. The sample consisted of village chief, neighbourhood, hamlet and village consultative body (BPD) in Danasari village, Pemalang District, Pemalang Regency. Sampling in this study using purposive sampling technique. The data of this study were collected through a questionnaires with hypothesis testing carried out by Multiple Linear Regression Analysis used SPSS version 22 application.

The results showed that the variable financial statement presentation, village information accessibility and society participation had a positive and significant effect on the accountability of village financial management in Danasari Village, Pemalang District, Pemalang Regency. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded, if the better financial statement presentation, village information accessibility and society participation then accountability of village financial management in Danasari village, Pemalang District, Pemalang Regency will also be better.

Keywords : *Presentation Of Financial Statements, Society Participation And Accountability Of Village Financial Management, Village Information Accessibility,*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Syukur Alhamdulillah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Danasari Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.”**

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan dan kerja sama berbagai pihak yang turut membantu selama penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

3. Bapak Ratno Agriyanto M.Si., Akt., CA., CPA, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang senantiasa memberi semangat dan motivasi
4. Bapak Warno SE., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang senantiasa memberi semangat dan motivasi
5. Bapak Rahman El-junusi SE., M.M., selaku dosen pembimbing I, yang telah memberi bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi
6. Bapak Nurudin SE., M.M., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberi bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan selama pembuatan skripsi ini
9. Bapak Kepala Desa Danasari Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang yang telah memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis

10. Para Informan di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang yang dengan senang hati meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna penyusunan skripsi ini
11. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2015 yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis
12. Sahabat-sahabat penulis Fudoh, Dinda, Uju, Nana, Swisti, Widi, Anggun, Nova, Vivi, Ulya, Nia dan Ica yang selalu menguatkan dan memberi semangat tiada henti kepada penulis
13. Teman-teman KKN Posko 37 Desa Wonosari Demak, yang telah memberi keceriaan, motivasi dan semangat kepada penulis
14. Teman-teman Kost Muslimah, yang telah menemani dan memberi semangat selama penyusunan skripsi
15. Arief R., yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang telah diberikan selama penyusunan skripsi
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis dapat diterima Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Juli 2019

Penulis

Tri Yuli Astuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.5. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Penyajian Laporan Keuangan	19
2.2. Aksesibilitas Informasi Desa	24

2.3. Partisipasi Masyarakat	28
2.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	32
2.5. Hasil Penelitian Yang Relevan	38
2.6. Kerangka Pemikiran Teoritik.....	41
2.7. Hipotesis Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1. Jenis dan sumber data	45
3.2. Populasi dan Sampel.....	46
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.4. Variabel Penelitian dan Pengukuran	48
3.5. Teknik Analisis Data	51
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	59
4.1. Gambaran Umum Penelitian.....	59
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	70
4.3. Uji Instrumen.....	75
4.4. Uji Asumsi Klasik	80
4.5. Uji Hipotesis.....	87
4.6. Pembahasan Hasil Analisis Data	92
BAB V PENUTUP	99
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Keterbatasan Penelitian	100
5.3. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Pendapatan Desa Danasari Tahun 2018.....	12
Tabel 2.1	: Belanja Desa Danasari Tahun 2018.....	38
Tabel 3.1	: Keuangan Desa Danasari Tahun 2018.....	49
Tabel 4.1	: Hasil Penelitian Yang Relevan	62
Tabel 4.2	: Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran.....	66
Tabel 4.3	: Pengumpulan Data	70
Tabel 4.4	: Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	71
Tabel 4.5	: Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...	72
Tabel 4.6	: Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	72
Tabel 4.7	: Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan.....	73
Tabel 4.8	: Hasil Uji Statistik Deskriptif	74
Tabel 4.9	: Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan....	75
Tabel 4.10	: Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Informasi Desa.....	76
Tabel 4.11	: Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat	77
Tabel 4.12	: Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	78
Tabel 4.13	: Hasil Uji Reliabilitas Penyajian Lapora Keuangan .	
Tabel 4.14	: Hasil Uji Reliabilitas Aksesibilitas Informasi Desa.	78
Tabel 4.15	: Hasil Uji Reliabilitas Partisipasi Masyarakat.....	79
Tabel 4.16	: Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	79

Tabel 4.17	: Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	82
Tabel 4.18	: Hasil Uji Multikolonieritas	83
Tabel 4.19	: Hasil Uji Glejser	86
Tabel 4.20	: Hasil Uji Statistik t	87
Tabel 4.21	: Hasil Uji Koefisien Regresi R^2	89
Tabel 4.22	: Analisis Regresi Linear Berganda	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritik.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	61
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas	80
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Grafik Plot	81
Gambar 4.4 Hasil Uji Scatterplot	85

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Deskripsi Responden
- Lampiran 3 : Hasil Uji Deskriptif Jawaban Responden
- Lampiran 4 : Jawaban Responden
- Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas
- Lampiran 6 : Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 7 : Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 8 : Hasil Uji Multikolonieritas
- Lampiran 9 : Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 10 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
- Lampiran 11 : Dokumentasi Informan
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Diberlakukannya Undang-Undang Desa tersebut, yang menjadi perhatian adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan Desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya.¹

Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak

¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, Jakarta : IAI-KASP, 2015, h.1

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.² Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Lembaga-lembaga publik harus dapat menjadi subyek informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.³

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel yakni bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Anggaran yang akuntabel sudah menjadi jargon yang terus dibicarakan oleh banyak kalangan dan menjadi tuntutan atau harapan publik mulai disadari bahkan oleh kelompok masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya proses penganggaran masih sangat jauh dari

² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2002), h. 20

³ Nazrina Zuryani, dkk., *Akuntabilitas Partai Politik* , Bali: Udayana University Press, 2016, h.5

⁴ BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta : 2015, h. 35

istilah akuntabilitas. Anggaran yang akuntabel adalah anggaran direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan dari segi proses harus melibatkan masyarakat dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan otonomi daerah.

Konsep akuntabilitas dalam Islam diartikan sebagai kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengolah sumber daya publik dan dapat mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban kepada Tuhan berkaitan dengan sifat amanah sehingga manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S An-Nisa' : 58) :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁵

Dari ayat tersebut dijelaskan, bahwa amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki setiap umat dan bagi

⁵ <https://alquranmulia.wordpress.com/2016/02/08/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-58/> diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 20.42 WIB

yang menerima amanat harus menjaga amanah yang diberikan. Dalam praktek akuntansi, amanah di interpretasikan sebagai akuntabilitas, bahwa para pemegang amanah harus bertanggungjawab kepada pihak yang bersangkutan. Pemegang amanah yaitu sektor publik dalam penelitian ini pemerintahan desa yang diberi amanah oleh masyarakat, kemudian pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan kepada masyarakat.

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Tuhan, dimana segala tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pengungkapan tersebut dilakukan pertama yaitu untuk Allah SWT dan yang kedua kepada masyarakat. Hal tersebut karena, akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana kesejahteraan umat juga menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan.⁶

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus atau mengatur diri sendiri

⁶ Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, ZISWAF Volume 3, No. 1 Juni 2016, h. 27

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya terhadap masyarakat.⁷

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas disektor publik membuat manajemen sektor publik harus berupaya meningkatkan sistem akuntabilitasnya kearah yang lebih baik. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, maka harus diketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa. Faktor yang pertama adalah penyajian laporan keuangan.

Laporan tugas utama desa adalah bentuk penyajian fakta yang disajikan, hal tersebut berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan. Karena tugas utama desa adalah sebagai pengemban peradaban atau pengembangan produksi, peningkatan standar kehidupan serta melembagakan pengelolaan desa secara demokratis, maka lingkup laporan desa ini adalah pelaksanaan program dan pencapaian tugas-tugas utama desa tersebut.⁸ Jika dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan bisa dijadikan sebagai alat pengendalian dan

⁷ Ni Komang dan Gayatri, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 26, Nomor 2 Februari 2019, h. 1270

⁸ Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2015, h. 337

evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan jika dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan dapat dijadikan alat pertanggungjawaban. Sehingga laporan keuangan bersifat sangat penting sebagai alat ukur sejauh mana kinerja sudah dilaksanakan dan menjadi bukti apakah kinerja sudah bisa dikatakan akuntabel.

Faktor kedua adalah aksesibilitas atau keterbukaan informasi desa. Pasal 24 huruf d Undang-Undang Desa menjelaskan tentang keterbukaan. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Asas keterbukaan dalam Undang-Undang Desa itu juga selaras dengan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang tersebut memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik serta memberikan kewajiban kepada badan-badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas.⁹

⁹ Mahbub Junaidi dan Agni Istighfar, *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa*, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2015, h. 1

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat akuntabilitas. Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya berarti mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban untuk setiap kebijakan publik, dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung serta tersedianya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah desa.

Faktor yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan salah satu elemen penting dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan. Hal tersebut penting supaya pembangunan desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu hal tersebut dapat mengurangi timbulnya persoalan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin partisipasi aktif

masyarakat, disebutkan salah satu dasar pengaturan desa didasarkan pada asas partisipasi.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan antara lain penelitian oleh Superdi yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.¹¹ Salomi J.H, menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.¹² Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan maka akan semakin baik tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho R., dkk, yang menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.¹³

¹⁰ Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 3, h.5

¹¹ Superdi, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Fakultas Ekonomi, Volume 4, Nomer 1 Februari 2017, h. 2026

¹² Salomi J. H, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*, ISSN 2302-9791, Volume 2 No. 1 May 2015, h. 87

¹³ Ridho R, dkk., *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, ejournal Volume 7, Nomor 1 2015, h. 11

Penelitian yang mendukung pentingnya aksesibilitas dilakukan oleh Faza Meilia, dkk., yang menyimpulkan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Dari hubungan tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas pengelolaan dana desa, maka akan semakin baik pula persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa, karena masyarakat berhak mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.¹⁴ Akan tetapi, hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Melisha, yang menyimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Aulia mendukung pentingnya faktor partisipasi masyarakat, hal tersebut

¹⁴ Faza Meilia F, dkk., *Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Prubalangga*, Seminar Nasional dan Call For Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8 Purwokerto , 19 September 2018, h. 13

¹⁵ Melisha Nitasari. F.P, *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Skripsi, IAIN Surakarta, 2018, h. 77

ditunjukkan dengan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.¹⁶ Hasil pengujian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin M., dkk., yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo.¹⁷ Berdasarkan penelitian terdahulu yang menghasilkan beberapa pengaruh variabel yang berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan

¹⁶ Putri Aulia, *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota*, JOM FEB, Volume 1, Edisi 1 (Januari – Juni 2018), h. 11

¹⁷ Sarifudin M, dkk., *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo*, *ejournal unsrat*, Volume 8, Nomor 2, 2017, h. 113

desa yang baik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pemerintah desa diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Di tahun 2018 desa di Jawa Tengah menerima kucuran dana desa sejumlah Rp. 6, 74 triliun. Dana tersebut akan dibagi ke sebanyak 7.809 desa di Jawa Tengah. Sehingga, masing-masing rata-rata desa akan menerima sekitar Rp. 863 juta, berbeda di tahun 2017 rata-rata desa mendapat kucuran dana sebesar Rp. 817 juta, hal tersebut menunjukkan bahwa dana desa yang diterima oleh setiap desa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.¹⁹

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang yang merupakan salah satu entitas pelaporan yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang

¹⁸ Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1, h. 2

¹⁹ M Nur Huda, *Tahun 2018 Per Desa Rata-rata Terima Dana Desa Rp 863 Juta*, <http://jateng.tribunnews.com/2018/01/01/tahun-2018-perdesa-rata-rata-terima-dana-desa-rp-863-juta>, diakses 11 Maret 2019

ada. Keuangan Desa yang diperoleh pemerintah Desa Danasari pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keuangan Desa Danasari Tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 358.887.300
2.	Dana Desa (DD)	Rp. 982.901.000
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 585.931.000
4.	Bantuan Provinsi (BANPROV)	Rp. 55.000.000
TOTAL PENDAPATAN		Rp. 1.982.719.300

Sumber : kantor kelurahan desa danasari pemalang tahun 2018

Cukup besarnya dana yang diterima pemerintah desa, seharusnya pemerintah desa lebih meningkatkan tingkat pertanggungjawabannya. Akan tetapi, pada pelaksanaannya pemerintah desa Pemerintah Desa Danasari mengalami berbagai kendala, yaitu sebanyak 14 desa di Kecamatan Pemalang, belum mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa tahap kedua tahun 2019. Salah satu dari 14 desa yang belum mengajukan pencairan AAD adalah Desa Danasari Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pemerintah desa danasari lebih meningkatkan

²⁰

MC Kabupaten Pemalang,
<http://www.infopublik.id/kategori/nusantara/354434/14-desa-belum-ajukan-pencairan-add-tahap-ii>, diakses pada 31 Juli 2019

pertanggungjawabannya dengan segera mengajukan pencairan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

Besarnya keuangan desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Danasari Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang seharusnya pemerintah desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, akan tetapi pada pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala yaitu, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Wahroni, selaku ketua RT 21 di Desa tersebut, kendala yang dialami yakni masyarakat setempat masih banyak yang belum mengetahui terkait pengelolaan keuangan desa, bagaimana dana desa yang jumlah cukup besar digunakan serta dibelanjakan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sebagai pemberi amanah masyarakat tentunya wajib mengetahui bagaimana dan untuk apa saja keuangan desa digunakan oleh pemegang amanah dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat setempat masih minim informasi terkait pengelolaan keuangan desa.²¹

Berkembangnya teknologi dan informasi setiap pemerintah desa bisa meningkatkan akuntabilitas dengan mudah salah satunya yaitu informasi desa yang mudah diakses, terkait dengan keuangan desa digunakan untuk apa saja dan

²¹ Wawancara Ketua RT, Dukuh Pecolotan, Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Juni 2019

untuk kegiatan apapun sebaiknya diungkapkan. Seharusnya pemerintah desa memiliki *website* yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat membuka informasi desa sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat luas. Akan tetapi pada kenyataannya, Pemerintah Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang sudah ada situs atau *website* yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa namun *website* tersebut kurang dikelola, sehingga informasi tentang desa sulit diketahui.

Tidak tersedianya laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban melalui papan informasi desa, *website*, maupun surat edaran dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa membuat masyarakat setempat sulit mengetahui realisasi penggunaan keuangan desa, padahal hal tersebut merupakan hak masyarakat. Bapak Saefudin selaku salah satu RW 3 di desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang mengatakan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan desa juga masih dirasakan oleh warga setempat.²² Dari permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten

²² Wawancara Ketua RW , Dukuh Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Juni 2019

Pemalang. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?
2. Apakah aksesibilitas informasi desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

2. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas informasi desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak, diantaranya :

1. Bagi Akademisi
Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
 - a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah yang sama.
 - b. Guna mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yaitu sejauh mana teori-teori yang sudah ditetapkan di laksanakan di lapangan sehingga hal-hal yang dirasa kurang dapat diperbaiki.
2. Bagi Praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi aparat Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, baik berupa masukan ataupun

pertimbangan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- b. Penelitian ditujukan kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang karena masyarakat termasuk pengguna laporan keuangan yang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam 5 Bab, yaitu :

BAB 1, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, merupakan bab tinjauan pustaka yang menjelaskan deskripsi teori tentang penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III, merupakan bab metode penelitian, berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran dan teknik analisis data

BAB IV, merupakan bab analisis data dan pembahasan, berisi tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji hipotesis

BAB V, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo, laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.²³ Menurut Hafzan, laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat atau daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.²⁴

Menurut Superdi, penyajian laporan keuangan adalah salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.²⁵ Dari pengertian tersebut, maka peneliti

²³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2002, h. 159

²⁴ Hafzan Fikrian, *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*, Jurnal Fakultas Ekonomi, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017, h. 269

²⁵ Superdi, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*

menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh organisasi publik dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dan sebagai pemenuhan tanggungjawab terhadap amanah dalam mengamankan dana. Tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah berfokus pada akuntabilitas dari manajemen atas amanah yang diberikan dan diwujudkan dalam konsep pertanggungjawaban baik kepada Allah SWT, antarsesama manusia, dan alam semesta.²⁶ Hal tersebut sesuai dengan perintah-Nya dalam Q.S An-Nisa ayat 58, yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,*

Kabupaten Sijunjung), Jurnal Fakultas Ekonomi, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017, h. 2016

²⁶ *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, Jakarta : IAI, 2016, h.6

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia yang telah diberi amanat hendaknya amanat tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanat. Dalam hal ini yaitu, pemerintah desa diberi amanat oleh masyarakat untuk mengelola keuangan desa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah desa harus menjalankan amanat secara baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam siklus keuangan desa, hal yang paling penting adalah mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagai wilayah yang mendapat anggaran dari pemerintah, kini desa menjadi obyek dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini membuat desa harus berpedoman pada petunjuk teknis mengenai pengelolaan keuangan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, penanggungjawab adalah Kepala Desa. Pasal 103 dan 104 menyebutkan kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota. Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.

Meskipun Penanggungjawab keuangan desa adalah Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) juga mengatur penatausahaan harian dan laporan pertanggungjawaban bulanan yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam membantu Kepala Desa. Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan.²⁷

Tujuan khusus pelaporan kecamatan dan desa adalah menyediakan informasi yang relevan demi pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas organisasi kecamatan dan desa atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan ini manfaat adanya pelaporan kecamatan dan desa, yakni menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan organisasi kecamatan dan desa, menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi kecamatan dan desa mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya.

²⁷ Chomariyah, dkk, *Keuangan Desa Pesisir*, Malang : Inteligencia Media , 2016, h. 42-43

Selain itu tujuan pelaporan keuangan desa yaitu, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan organisasi kecamatan dan desa dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan organisasi dan perubahannya, serta menyediakan informasi keseluruhan yang berguna ketika mengevaluasi kinerja organisasi kecamatan dan desa dalam hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan pembangunan.²⁸

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi, transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah

²⁸ Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2015, h.338

neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan / posisi keuangan desa

5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.²⁹

Penyajian laporan keuangan merupakan suatu ukuran yang normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran normatif tersebut terdapat pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan karakteristik kualitatif laporan keuangan pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyajian laporan keuangan desa yang baik dapat terhindar dari adanya tindak kecurangan.³⁰

2.2. Aksesibilitas Informasi Desa

Aksesibilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal yang dapat dijadikan akses.³¹ Sedangkan menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan

²⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press, 2015, h..23

³⁰ Laila, dkk., *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Volume 6, edisi 12, Maret 2018, h. 142

³¹ <https://kbbi.web.id/aksesibilitas> diakses pada tanggal 10 Mei 2019

seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan wajar. Menurut Nur Laila, aksesibilitas merupakan faktor penting terwujudnya transparansi pemerintah, yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah dan masyarakat.³²

Menurut Shende dan Bennet, dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (*internet*) dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan kepada tingkatannya saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.³³

³² Nur Laila Yuliani, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Volume 24 No. 1, h.2

³³ Siti Aliyah dan Aida Nahar, “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*”, Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8, Nomor 2, 2012, h.139

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh suatu informasi secara langsung maupun tidak langsung dan bersifat terbuka, yang berarti dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa harus membuka akses kepada seluruh masyarakat setempat. Akses yang diberikan bisa secara langsung maupun melalui media internet seperti *website* desa atau melalui media lain.

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini tersedia diberbagai media, seperti surat kabar, majalah dan internet.³⁴ Di dalam Islam, keterbukaan dijelaskan dalam Al-qur'an surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : “Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. maka Allah

³⁴ Salomi. J. Hehanussa, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Ambon”. ISSN 2302-9791. Volume 2, Nomor 1 May 2015, h. 84

menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, mengutus tiap-tiap rasul kepada kaumnya dengan memakai bahasa kaumnya, hal tersebut supaya dapat menerangkan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka faham dan mengerti maksudnya. Aksesibilitas dalam hal ini menyangkut dalam bahasa yang disampaikan, sehingga segala informasi dapat dipahami dan mudah dimengerti, dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaiannya. Hal tersebut, seharusnya dapat ditetapkan organisasi sektor publik dalam hal ini yaitu pemerintah desa, agar menyampaikan informasi pertanggungjawabannya.

Keterbukaan informasi bukan hal yang harus ditakuti, karena dengan keterbukaan informasi akan mendorong beberapa hal yang positif dan mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang baik diantaranya , dibukanya akses masyarakat terhadap informasi publik akan mendorong peran serta atau partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di desa. Keterbukaan informasi pemerintahan desa akan menghilangkan prasangka, kecurigaan atau rumor negatif masyarakat terhadap pelaksana pemerintahan desa serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan informasi. Potensi penyalahgunaan informasi

untuk kepentingan pribadi, termasuk penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi akan terjadi ketika Informasi Publik ditutup dan hanya diketahui oleh sejumlah atau sekelompok kecil orang saja.³⁵

2.3. Partisipasi Masyarakat

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Partisipasi masyarakat terdiri atas dua kata yaitu partisipasi dan masyarakat. Partisipasi dalam bahasa Inggris yaitu *participation* yang artinya pengambilan bagian dan pengikutsertaan. Sedangkan masyarakat dalam Bahasa Inggris yaitu *society* yang berarti perkumpulan, perhimpunan dan lembaga. Ini berarti partisipasi masyarakat yaitu mengikutsertakan banyak orang atau perkumpulan.³⁶

Ditinjau dari optik politik hukum, istilah partisipasi masyarakat di Indonesia dikenal sebagai “peran serta”. Menurut Muin Fahmai, peran serta merupakan suatu pengertian yang seringkali dipertukarkan dengan istilah “partisipasi”, peran serta merupakan salah satu bentuk partisipasi. Unsur-unsur dari peran serta yaitu, tersedianya suatu kesempatan (yang diorganisir) bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan

³⁵ Mahbub Junaidi dan Agni Istighfar P, *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintah Desa*, Jawa Timur : Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2015, h.10

³⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi> diakses pada 15 Mei 2019

pemikirannya terhadap pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dengan pemerintah, dan dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil diskusi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.³⁷

Menurut Hamsinar, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintah, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah serta meminimalisir terjadinya penyelewengan.³⁸ Sedangkan, menurut *Crook dan Sverrisson* dalam Putri Aulia menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat tingkat akuntabilitas dimana partisipasi dimulai dari awal evaluasi sampai pelaporan. Partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas mengingat tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah.³⁹

Sehingga dapat diambil kesimpulan, partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan

³⁷ Chomariyah, dkk, Op. Cit., h.11

³⁸ Hamsinar, Skripsi : *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi*, Makasar : UIN Alauddin, 2017, h. 20

³⁹ Putri Aulia, *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 1, Edisi 1 Januari-Juni 2018, h. 6

melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Prinsip-prinsip partisipasi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut :

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahannya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.
2. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
3. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁰

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka peran dan keterlibatan

⁴⁰ Riska Apriliana, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Surakarta : IAIN Surakarta, 2017, h. 71

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan. Karena, pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola desa secara tegas juga mensyaratkan hal itu, terlihat dari fungsi pokok Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa bagi Kepala Desa (Pemerintah Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa dapat membantu pemerintah desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas. Hal tersebut tentunya membantu pemerintah desa melaksanakan keperintahan yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sesuai amanat yang terkandung dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai tuntunan bahwa setiap manusia selalu tolong menolong dalam hal kebaikan, yaitu dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

Berdasarkan uraian ayat tersebut, dijelaskan bahwa Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam penelitian ini yaitu adanya partisipasi

masyarakat terhadap pemerintah desa yaitu dalam bentuk keterlibatan masyarakat (partisipasi) dapat membantu pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang jujur, bersih dan akuntabel serta dipercayai oleh masyarakat.

Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, karena hal tersebut dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan, menumbuhkan rasa memiliki sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan produk-produk pembangunan dari pemerintahan desa maupun masyarakat sendiri, serta memberikan legitimasi dan keabsahan atas segala yang telah diputuskan bersama.⁴¹

2.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Salah satu karakteristik konsep *good governance* yang dianggap penting untuk dibahas dalam bahasan ini adalah prinsip akuntabilitas. Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris (*accountability*) yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan ini, akuntabilitas

⁴¹ Ellectrananda Anugerah dan Hindrawan Wibisono, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4, Nomor 1 Tahun 2018, h.128

adalah pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada masyarakat, mengukur sejauh mana pertanggungjawaban dari penentu kebijakan yaitu pemerintah telah merealisasikan kebijakannya dalam upaya memenuhi harapan masyarakat.⁴²

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit diwujudkan daripada memberantas korupsi (Turner and Hulme, 1997). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama bagi organisasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal dan bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.⁴³

Menurut Muhammadong, akuntabilitas dapat dikatakan apabila setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁴² Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2017, h.131

⁴³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi Offset, 2002, h. 21

undangan yang berlaku.⁴⁴ Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan dimana hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu, mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah.⁴⁵

Terkait dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

⁴⁴ Muhammadong, *Good Governance salam Perspektif Hukum Islam*, Makassar : Edukasi Mitra Grafika, 2017, h. 11

⁴⁵ Rizal Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah*, Jakarta : RM Books , 2014, h. 408

pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kewajiban Kepala Desa tersebut jika tidak dilaksanakan, maka akan dikenai sanksi. Adapun bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada Kepala Desa yang melanggar kewajiban tersebut disebutkan sebagai sanksi administratif yang berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.⁴⁶

Prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalfahan di muka bumi. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah yang telah diberikan. Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai “Khalifah” dalam bentuk amanah dan sebagai wakil Allah

⁴⁶ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang : Setara Press, 2014, h. 82

SWT. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang.” (QS. al-An'am: 165).⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai “khalifah” dan bagaimana konsep pertanggungjawaban ditekankan dengan perintah dari Allah SWT melalui istilah “hisab” atau perhitungan/pengadilan (*accountability*) di hari pembalasan. Hisab dalam arti umum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk bertanggungjawab kepada Allah SWT dalam segala hal yang berkaitan dengan manusia.⁴⁸

Berkaitan dengan akuntabilitas, di dalam Al-Qur'an telah disebutkan kata “Hisab”. Persamaan Hisab dengan Akuntansi terletak pada tanggungjawab setiap Muslim seperti

⁴⁷ <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/22/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-anam-ayat-165/>, diakses pada tanggal 14 februari 2019

⁴⁸ Rahmah Yulisa , *Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah dilembaga Bisnis Syariah*, JESTT Vol.1 No.7 Juli 2014 ,Surabaya : Universitas Airlangga, h. 507

yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Di dalam suatu entitas diharuskan mempertanggungjawabkan tindakannya dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. "Hisab" berhubungan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas) setiap umat manusia kepada Allah SWT.⁴⁹ Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ النَّقْفِيُّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"Tidak beriman orang yang tidak bisa menjaga amanah yang dibebankan padanya. Dan tidak beragama orang yang tidak bisa menepati janjinya." (HR. Ahmad bin hambal).⁵⁰

Hadis di atas bermakna bahwa Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam menjadikan amanah sebagai bukti keimanan seseorang dan kebaikan akhlaknya. Amanah merupakan salah satu sifat yang sangat dijunjung di dalam Islam. Amanah dikaitkan dengan kemampuan individu untuk menjaga tugas yang diberikan kepadanya. Amanah dapat dikatakan sebagai bentuk kepercayaan atas apa yang telah diberikan, yang nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁹ Halim Fawzi, *Akuntabilitas dalam Akuntansi Islam*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember

⁵⁰ <http://anggunsetyowati3.blogspot.com/2016/11/menjaga-amanat-adalah-bagian-dari-iman.html> diakses pada tanggal 18 Februari 2019

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁵¹

2.5. Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Salomi J. Hehanussa, 2015	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon	<u>Variabel</u> <u>Dependen</u> : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah <u>Variabel</u> <u>Independen</u> : Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas

⁵¹ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta : Kementerian Keuangan RI, 2017, h.27

			dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	pengelolaan keuangan daerah
2.	Wildan Andika S, 2016	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional dan Audit Kerja Terhadap Akuntabilitas Publik	<u>Variabel</u> <u>Dependen</u> : Akuntabilitas Publik <u>Variabel</u> <u>Independen</u> : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional dan Audit Kerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik
3.	Superdi, 2017	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Sijunjung)	<u>Variabel</u> <u>Dependen</u> : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah <u>Variabel</u> <u>Independen</u> : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4.	Ema Titien, 2017	Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) di	<u>Variabel</u> <u>Dependen</u> : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) <u>Variabel</u> <u>Independen</u> :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas

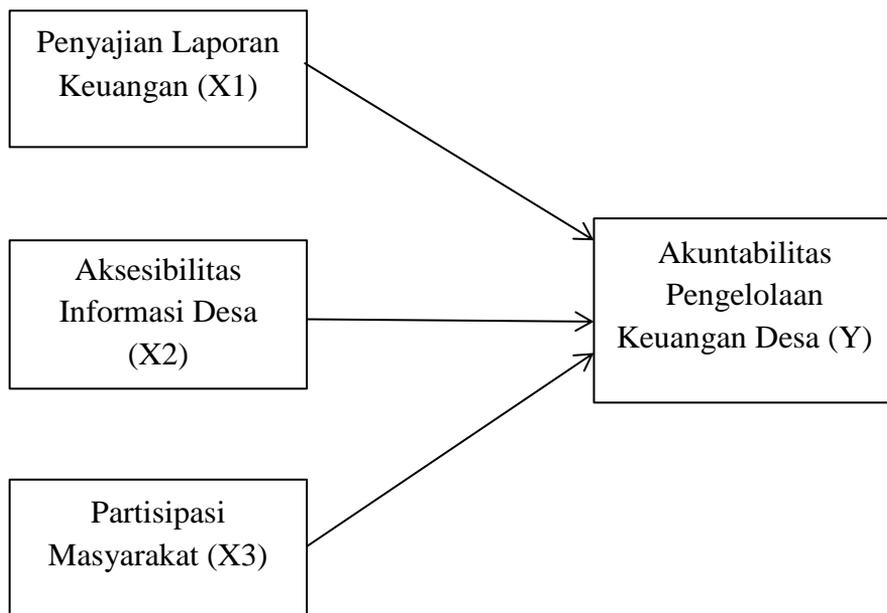
		Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo	Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas	pengelolaan alokasi dana desa (AAD)
5.	Putri Aulia, 2018	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<u>Variabel</u> <u>Dependen</u> : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa <u>Variabel</u> <u>Independen</u> : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat. Dengan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peneliti juga menggunakan objek yang berbeda yaitu Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

2.6. Kerangka Pemikiran Teoritik

Kerangka pemikiran yang akan dibentuk dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritik



2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Penyajian laporan desa yaitu menyediakan informasi yang relevan demi pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas kecamatan dan desa atas sumber daya yang telah dipercayakan.⁵² Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, salah satunya dapat dilihat melalui penyajian laporan yang tertulis.⁵³ Penelitian oleh Superdi (2017), Ema Tietien (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2. Pengaruh Aksesibilitas Informasi Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Pemerintah berkewajiban untuk

⁵² Indra Bastian, *Op. Cit.* h. 338

⁵³ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.* h. 28

memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan dijadikan untuk pengambilan keputusan serta untuk mendorong akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.⁵⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Charli Andreas (2015) dan oleh Lily (2015) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Aksesibilitas Informasi Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa,

⁵⁴ Lily, *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, h. 3

sehingga dapat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.⁵⁵ Penelitian oleh Putri Aulia (2018) dan Khaeril (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

⁵⁵ M. Herli dan Hafidhah, *Peran Pengawasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan di Desa*, Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi Volume vii, Nomor 1, Maret 2017, h. 51

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka. Penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis atau teori tertentu melalui pengukuran variabel-variabel penelitian.⁵⁶ Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing.⁵⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya, pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian.⁵⁸

⁵⁶ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, h. 109

⁵⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006, h. 258

⁵⁸ Suryani dan Hendryadi, *Op Cit*, h. 170

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya atau dengan kata lain populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.⁵⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Dusun di Desa Danasari Pemalang, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang diambil sebagai sampel, maka kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.⁶⁰

Menurut Arikunto dalam Ema Tietien, apabila subyek dari populasi penelitian kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, dan apabila subyek populasi besar atau

⁵⁹ Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, h. 94

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016, h. 81

lebih dari 100 orang, maka dapat diambil yaitu antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 42 responden, karena populasi berjumlah kurang dari 100, maka diambil semua sebagai sampel. Sampel terdiri dari 21 RT, 8 RW, 9 BPD dan 4 Kepala Dusun.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) dan dokumentasi :

3.3.1 Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya.⁶¹ Pengukuran variabel dilakukan menggunakan *skala Likert*, dengan *skala Likert* maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Sehingga untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

⁶¹ *Ibid.* h. 142

5 = Sangat Setuju (SS).⁶²

3.3.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan atas dokumen yang diperlukan mengenai gambaran umum atau profil Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

3.4. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya.⁶³ Variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut :

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, variabel dependen dijadikan sebagai variabel yang menjadi fokus atau topik penelitian.⁶⁴ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

⁶² *Ibid.* h. 93

⁶³ *Ibid.* h. 38

⁶⁴ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 57

3.4.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau variabel yang menghasilkan akibat pada variabel yang lain. Variabel independen variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian.⁶⁵ Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas Informasi Desa (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3).

3.4.3 Definisi Operasional Variabel

Berikut ini disajikan ringkasan dari variabel penelitian dan indikator yang akan digunakan untuk pembuatan kuesioner :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi	1. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku 2. Pertanggungjawaban kepada publik 3. Terbuka, cepat dan tepat 4. Penyusunan APBDesa 5. Memonitor	Skala Likert

⁶⁵ *Ibid.* h. 57

		pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan secara periodik (Superdi, 2017)	kinerja dan mengevaluasi manajemen	
2.	Penyajian Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan atau SAP yang terdapat pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 (Laila N.R, dkk., 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Tepat waktu 4. Lengkap dan penyajiannya jujur 5. Dapat dibandingkan, dapat dipahami, netral dan tidak ditutup tutupi 	Skala Likert
3.	Aksesibilitas Informasi Desa	Aksesibilitas merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi, misalnya kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Wildan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. <i>Accesible</i> 	Skala Likert

		Andika, 2016)		
4.	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, agar dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan (Heller et al, 1984, dalam Khaeril Wahyu, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa 2. Mengusulkan rencana anggaran 3. Terlibat dalam rapat paripurna 4. Terlibat mengawasi dan melaporkan 5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran 	Skala Likert

3.5. Teknik Analisis Data

Model dalam penelitian ini adalah model kaulitas (hubungan/ pengaruh sebab akibat), sehingga pada penelitian ini yang akan digunakan adalah :

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

generalisasi.⁶⁶ Kegunaan utama statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan jawaban-jawaban observasi, yang termasuk di dalamnya adalah distribusi frekuensi, distribusi persen dan rata-rata (*mean*).⁶⁷

3.5.2 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai-nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan.⁶⁸ Menurut Ghazali, jika r hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.⁶⁹

⁶⁶ Lijan Poltak S, *Op Cit*, h. 189

⁶⁷ Jonathan Sarwono, *Op Cit.*, h. 138

⁶⁸ Superdi, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Volume 4 Nomor 1, Februari 2017, h. 2021

⁶⁹ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001, h. 53

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil.⁷⁰ Menurut Kuntjojo, reliabilitas instrumen merupakan tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur, meskipun dipakai secara berulang-ulang pada subyek yang sama atau berbeda. Dengan demikian suatu instrumen dikatakan reliabel bila mampu mengukur sesuatu dengan hasil yang konsisten.⁷¹

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu melalui analisis grafik dan uji statistik. analisis grafik melalui dua cara yaitu melalui grafik histogram dan metode normal probability plot.

⁷⁰ *Ibid.* h. 47

⁷¹ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri : 2009, h. 37

Jika uji normalitas dilakukan melalui analisis grafik, maka pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya, jika data menyebar disekitar garis diagonalnya dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas selanjutnya yaitu melalui uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Suatu data dapat berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 5% atau 0,05, maka model tersebut dapat dikatakan normal.⁷²

2. Uji **Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel yang digunakan tidak ortogonal atau variabel sama dengan nol.⁷³ Pedoman yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dengan melihat

⁷² *Ibid*, h. 160

⁷³ Kuntjojo, *Op.Cit*, h. 105

nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dinyatakan tidak ada multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .⁷⁴

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali, uji heteroskedestisitas digunakan untuk mengetahui tidak adanya ketidaksamaan varian antar pengamatan. Pengujiannya dilakukan dengan Uji Glejser, yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlaknya dengan signifikansi 5% (0,05), apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.⁷⁵

3.5.4 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel

⁷⁴ Nur Ida, dkk., *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Volume 1, Nomor 1, 2018, h. 109

⁷⁵ Imam Ghazali, *Op. Cit.*, h. 142

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahuinya yaitu dengan melihat nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai signifikansi $<$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.⁷⁶

3.5.5 Uji Ketepatan Modal

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen, dengan nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 1, maka model tersebut dapat menjelaskan variabel independen dengan seluruh data yang ada.⁷⁷

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu suatu model yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷⁶ Imam Ghazali, *Op Cit*, h. 98

⁷⁷ Imam Ghazali, *Op. Cit*, h. 97

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi dari variabel independen

X₁ = Aksesibilitas Laporan Keuangan

X₂ = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X₃ = Sistem Pengendalian Intern

E = Standart Error (5%)⁷⁸

⁷⁸ Melisha Nitasari, Skripsi : *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2018, h. 62

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Profil Desa Danasari

Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, batas wilayahnya diantaranya adalah Laut Jawa disebelah Utara, Desa Widuri disebelah Barat, Desa Asem Doyong disebelah Timur, dan Desa Pelutan disebelah Selatan. Wilayah Desa Danasari sendiri terbagi atas delapan dukuh, yaitu Dukuh Kembaran, Dukuh Gembyang, Dukuh Danasari, Dukuh Pecolotan, Dukuh Siwalan, Dukuh Kamulyan, Dukuh Bungin dan Dukuh Pejarakan.

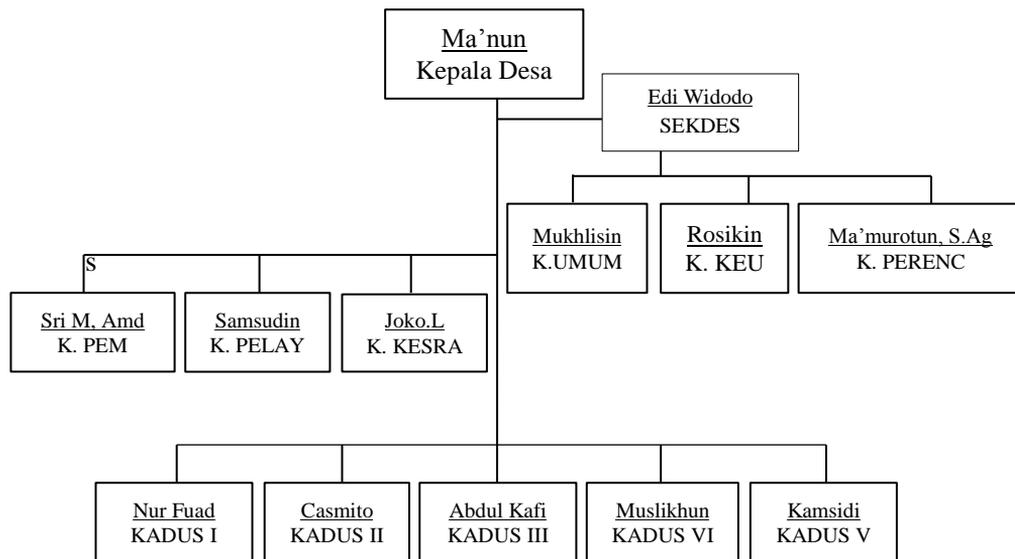
Kelurahan Danasari ini merupakan wilayah pedesaan dan dekat dengan pesisir, sehingga lahan pertanian dan perkebunan cukup luas, serta perikanan yang tak kalah luas. Dengan kondisi dan situasi yang demikian itu, maka mata pencaharian penduduk Desa Danasari terbagi kedalam beberapa sektor, yakni sektor pertanian, sektor perikanan tangkap, dan sektor swasta lainnya dengan mayoritas merantau dan membangun usaha, salah satu usaha yang terkenal yaitu usaha bubur ayam.

4.1.2 Luas wilayah Kelurahan Danasari

1. Luas wilayah Kelurahan Danasari mencakup areal seluas 358,435 hektare
2. Batas wilayah :
Sebelah utara : Laut Jawa
Sebelah selatan : Desa Wanarejan – Pelutan
Sebelah Barat : Desa Widuri
Sebelah Timur : Desa Asemdayong
3. Kondisi Geografis
Ketinggian tanah dari permukaan laut : 4 m
Banyaknya curah hujan : 500 mm/m
4. Orbitasi
Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan: 6 Km
Jarak dari ibu kota Kabupaten : 3 Km
Jarak dari ibu kota Provinsi : 122 Km
Jarak dari ibu kota Negara : 135 Km

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4.1.4 Keuangan Desa Danasari

Menurut pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya, pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 103 Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, selain itu Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang terdiri atas :

1. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Tabel 4.1
Pendapatan Desa Danasari Tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 358.887.300
2.	Dana Desa	Rp. 982.901.000
3.	Alokasi Dana Desa	RP. 585.931.000
4.	Bantuan Provinsi	Rp. 55.000.000
TOTAL		Rp. 1.982.719.300

Sumber : Pemerintah Desa Danasari

1.) Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas :

- a. Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa dan tanah kas desa

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

- b. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa dan jaringan irigasi
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- d. Pendapatan Asli Desa yang lainnya adalah hasil pungutan desa

2.) Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

3.) Alokasi Dana Desa

Pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan, Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatan desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

4.) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - 1.) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - 2.) Operasional pemerintah desa
 - 3.) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 4.) Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.⁷⁹

⁷⁹ IAI-KASP, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, IAI : Jakarta, 2015, h.1

Tabel 4.2
Belanja Desa Danasari Tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 871.027.500
2.	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 923.091.800
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 38.600.000
4.	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 50.000.000
5.	Penyertaan Modal	Rp. 100.000.000
Jumlah		Rp. 1.982.719.300

Sumber : Pemerintah Desa Danasari

Belanja Desa terdiri atas :

1.) Penyelenggaraan Pemerintahan

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa dan tunjangan BPD)
- b. Operasional perkantoran terdiri dari
 1. Belanja Barang dan Jasa, misalnya seperti belanja alat tulis kantor, perjalanan dinas, makan dan minuman rapat, ketentraman dan ketertiban dan lain sebagainya.

2. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, seperti : membeli komputer, beli meja dan lain sebagainya. Penyelenggaraan Pemerintahan dari Dana Desa Danasari tahun 2018, diantaranya digunakan untuk:
 - a.) Sarana Prasarana SID (E-Voting) sebesar Rp. 50.000.000
 - b.) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Desa sebesar Rp. 10.000.000
 - c.) Peningkatan Kapasitas Aparatur PEMDES sebesar Rp. 5.000.000
 - d.) Peningkatan Kapasitas KPMD sebesar Rp. 5.000.000
 - e.) Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES sebesar Rp. 5.000.000
- 2.) Pelaksanaan Pembangunan, Pasal 81 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan

seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Belanja pembangunan digunakan untuk perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan dan lain sebagainya.

Pelaksanaan Pembangunan dari Dana Desa Danasari Tahun 2018, diantaranya yaitu :

- a. Pembangunan Jamban Keluarga sebesar Rp. 60.000.000
- b. Perkerasan Jalan Gembyang RT 03/02 sebesar Rp. 57.410.000
- c. Perkerasan Jalan Bungin RT 18/07 sebesar Rp. 34.010.000
- d. Perkerasan Jalan Siwalan RT 8 dan 9 RW 04 sebesar Rp.118.729.000
- e. Rabat Beton/Jalan Setapak Bungin RT 13/06 sebesar Rp.72.008.000
- f. Pembangunan Talud Gembyang RT 03/02 sebesar Rp.44.815.000
- g. Pembangunan Talud Siwalan sebesar RT 8 dan 9 RW 04 sebesar Rp. 106.707.000

- h. Pembangunan Talud Bungin RT 18/07 sebesar Rp.101.420.000
 - i. Pembangunan/Pemeliharaan Drainase RT 05/03 sebesar Rp.142.343.000
 - j. Pembangunan/Pemeliharaan Drainase RT 19/20 sebesar Rp.70.459.000
- 3.) Pemberdayaan Masyarakat, Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, antara lain :
- a. Pembinaan lembaga masyarakat
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pembinaan lembaga adat
 - f. Pembinaan kesenian dan sosian budaya masyarakat
 - g. keadaan lain sesuai dengan kondisi desa
- 4.) Penyertaan Modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Penyertaan Modal, diantaranya yaitu Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer dan lain sebagainya. Belanja yang dikeluarkan untuk penyertaan modal Desa Danasari adalah

Rp.100.000.000 untuk penyertaan modal BUMDES/BUMDES Bersama.

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Dimana responden dalam penelitian ini yaitu perwakilan masyarakat di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Peneliti mengambil perwakilan Kepala Dusun, RT, RW, dan BPD dengan jumlah keseluruhan sebanyak 42 kuesioner. Waktu penyebaran sampai dengan pengumpulan berlangsung selama satu minggu pada bulan Juni 2017. Dari 42 kuesioner yang disebarakan secara langsung, keseluruhan responden menyampaikan kembali hasil jawaban kuesioner. Berikut ini rincian data dalam penelitian ini :

Tabel 4.3
Pengumpulan Data

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kuesioner yang diserahkan	42	100%
2.	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3.	Kuesioner yang diterima	42	100%
Kuesioner yang dianalisis untuk uji hipotesis		42	100%

Sumber : Jawaban kuesioner data diolah peneliti (2019)

4.2.2 Deskripsi Responden

Deskripsi responden dalam penelitian ini sebanyak 42 responden terdiri dari Kepala Dusun, RT, RW dan BPD. Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jawaban kuesioner yang diterima peneliti, karakteristik responden meliputi, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan dan masa jabatan. Hasil uji deskripsi responden penelitian adalah sebagai berikut :

1. Deskripsi Responden berdasarkan usia

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan usia

No	Usia	Deskripsi Frekuensi Responden	
		Frekuensi	Persentase (%)
1.	30 - 40 tahun	11	26,2 %
2.	41 - 50 tahun	16	38,1 %
3.	>50 tahun	15	35,7 %
	Jumlah	42	100 %

Sumber : Jawaban Kuesioner data diolah oleh peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 42 responden dalam penelitian ini, terdapat responden dengan kelompok umur 30-40 tahun sebanyak 11 responden atau sebesar 26,2%, kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 16 responden atau sebesar 38,1% dan

kelompok umur >50 tahun sebanyak 15 responden atau sebesar 35,7%.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Deskripsi Frekuensi Responden	
		Frekuensi	Persentase %
1.	Pria	42	100 %
2.	Wanita	0	0 %
Jumlah		42	100 %

Sumber : Jawaban kuesioner data diolah oleh peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 42 responden, jumlah responden yang berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 42 responden atau sebesar 100%, sedangkan responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 0 orang atau 0%. Sehingga, dapat disimpulkan dalam penelitian ini responden seluruhnya adalah pria yaitu sebanyak 42 responden atau 100 %.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.6
Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Deskripsi Frekuensi Responden	
		Frekuensi	Persentase %
1.	SD	10	23,8 %
2.	SMP	11	26,2 %

3.	SMA / SMK	21	45,2 %
4.	D3	-	-
5.	S1	2	4,8%
6.	Lain-lain	-	-
Jumlah		42	100%

Sumber : Jawaban kuesioner data diolah oleh peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 42 responden, tingkat pendidikannya terdiri dari tingkat SD sebanyak 10 orang atau sebesar 23,8%, SMP sebanyak 11 orang atau sebesar 26,2%, SMA/SMK sebanyak 21 orang atau sebesar 45,2% dan S1 sebanyak 2 orang atau sebesar 4,8%.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.7

Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Deskripsi Frekuensi Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Kepala Dusun	4	9,5 %
2.	BPD	9	21,4 %
3.	RT	21	50 %
4.	RW	8	19 %
Jumlah		42	100 %

Sumber : Jawaban kuesioner data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa responden berjumlah 42 orang, terdiri dari 4 orang yang menjabat sebagai kepala dusun atau sebesar 9,5%, 9

orang menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sebesar 21,4%, 21 orang menjabat sebagai ketua RT atau sebesar 50% dan 8 orang menjabat sebagai ketua RW yaitu sebesar 19%.

4.2.3 Hasil Uji Deskriptif

Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistics				
	Penyajian Laporan Keuangan	Aksesibilitas Informasi Desa	Partisipasi Masyarakat	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Valid	42	42	42	42
Missing	0	0	0	0
Mean	24,86	8,02	20,17	20,38
Std. Deviation	3,302	2,394	2,622	2,641
Minimum	20	3	14	14
Maximum	32	12	25	25

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.6, dapat di deskripsikan bahwa jumlah responden yang valid dan dapat diproses lebih lanjut sebanyak 42 responden. Pada variabel penyajian laporan keuangan, jawaban minimum responden sebesar 20 dengan rata-rata jawaban sebesar 24,86 dan standar deviasi sebesar 3,302. Pada variabel aksesibilitas informasi desa, jawaban minimum responden sebesar 3 dan maksimum responden

sebesar 12 dengan rata-rata jawaban sebesar 8,02 dan standar deviasi sebesar 2,394. Pada variabel partisipasi masyarakat, jawaban minimum responden sebesar 14 dengan rata-rata jawaban sebesar 20,17 dan standar deviasi sebesar 2,622. Sedangkan pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, jawaban minimum responden 14 dengan rata-rata jawaban sebesar 20,38 dan standar deviasi sebesar 2,641.

4.3. Uji Instrumen

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan signifikansi 5%, maka pernyataan dapat dikatakan valid. Untuk mengukur r_{tabel} yaitu, $r_{tabel} = \text{degrees of freedom (df)}$, $df = N - 2$. Dalam penelitian ini yaitu $42 - 2 = 40$ (nilai r_{tabel} adalah 0,257). Hasil uji validitas dengan bantuan komputer program SPSS versi 22,00 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan

No	Butir Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1.	PLK1	0,444	0,257	Valid
2.	PLK2	0,603	0,257	Valid
3.	PLK3	0,615	0,257	Valid
4.	PLK4	0,662	0,257	Valid

5.	PLK5	0,543	0,257	Valid
6.	PLK6	0,713	0,257	Valid
7.	PLK7	0,660	0,257	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.7, untuk variabel penyajian laporan keuangan menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian item-item pertanyaan atau pernyataan dalam variabel penyajian laporan keuangan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Informasi Desa

No	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1.	AID1	0,758	0,257	Valid
2.	AID2	0,850	0,257	Valid
3.	AID3	0,795	0,257	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji validitas tabel 4.8, untuk variabel aksesibilitas informasi desa menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan atau pernyataan dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian item-item pertanyaan atau pernyataan dalam variabel aksesibilitas informasi desa layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat

No	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1.	PM1	0,670	0,257	Valid
2.	PM2	0,816	0,257	Valid
3.	PM3	0,813	0,257	Valid
4.	PM4	0,731	0,257	Valid
5.	PM5	0,600	0,257	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan atau pertanyaan variabel partisipasi masyarakat dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian item-item pertanyaan atau pernyataan dalam variabel aksesibilitas informasi desa layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 4.12
**Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Desa**

No	Butir Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1.	APKD1	0,703	0,257	Valid
2.	APKD2	0,801	0,257	Valid
3.	APKD3	0,765	0,257	Valid
4.	APKD4	0,683	0,257	Valid
5.	APKD5	0,706	0,257	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan atau pertanyaan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dinyatakan valid, hal ini dibuktikan

dengan diperolehnya nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian item-item pertanyaan atau pernyataan dalam variabel aksesibilitas informasi desa layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah dikatakan valid dalam uji validitas, selanjutnya akan ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria jika *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, maka instrumen dinyatakan reliabel (Wildan, 2016). Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner pada masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 22 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas Penyajian Laporan Keuangan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,714	,715	7

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas Aksesibilitas Informasi Desa

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,722	,721	3

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas Partisipasi Masyarakat

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,767	,778	5

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Tabel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,751	,792	5

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0,714, *Cronbach's Alpha* dari variabel aksesibilitas informasi desa sebesar 0,722, *Cronbach's Alpha* dari variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,767 dan *Cronbach's Alpha* dari variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,751. Hasil *Cronbach's Alpha* dari setiap variabel nilainya lebih besar 0,6. Sehingga, dapat

disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dikatakan reliabel atau handal.

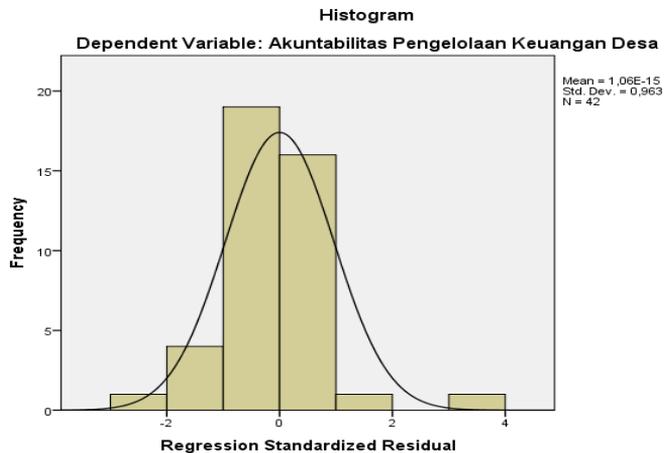
4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi yang normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas pada penelitian ini menggunakan menggunakan dua cara yaitu, dengan menggunakan analisis grafik dan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2

Grafik Histogram Uji Normalitas



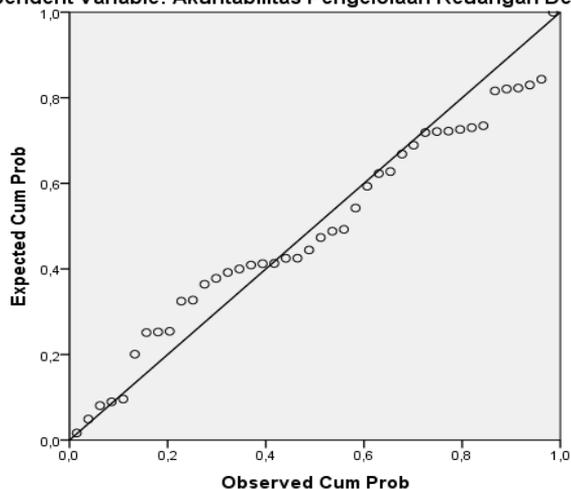
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (diolah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran residual yang normal, karena grafik tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena jumlahnya hanya sedikit. Cara selanjutnya untuk mengetahui data bersifat normal atau tidak, yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.3

Hasil Uji Normalitas Grafik Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Cara selanjutnya yaitu menggunakan grafik Normal P-Plot, berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa titik-titik mengikuti garis lurus atau berada tidak jauh dari garis diagonal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa residual yang digunakan dengan metode ini telah mengikuti distribusi normal (distribusi data normal). Selanjutnya, yaitu menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov, berikut hasil yang diperoleh dalam penelitian ini :

Tabel 4.17
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		42
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,72818236
Most Extreme	Absolute	,124
Differences	Positive	,124
	Negative	-,104
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,107 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.15, menunjukkan besarnya nilai *test statistic* 0,124 dan nilai signifikansi sebesar 0,107. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa data residual telah berdistribusi normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05.

4.4.2 Uji Multikolonierita

Uji multikolonieritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	1,015	3,127				,325
Penyajian Laporan Keuangan	,294	,090	,368	3,282	,002	,896	1,16
Aksesibilitas Informasi Desa	,463	,124	,420	3,750	,001	,898	1,14
Partisipasi Masyarakat	,413	,107	,410	3,850	,000	,993	1,07

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan hasil dari uji multikolonieritas di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh dari

masing-masing variabel adalah $<1,00$. Besar nilai *tolerance* dari masing-masing variabel yaitu, variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0,896, variabel aksesibilitas informasi desa sebesar 0,898 dan variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,993. Sehingga, nilai yang diperoleh dari masing-masing variabel telah memenuhi syarat dan tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Selain itu, untuk nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada tabel untuk masing-masing variabel adalah penyajian laporan keuangan sebesar 1,116, aksesibilitas informasi desa sebesar 1,114 dan partisipasi masyarakat sebesar 1,007. Sehingga, nilai yang diperoleh oleh masing-masing variabel juga telah memenuhi syarat yaitu dengan nilai VIF harus $>0,10$. Berdasarkan dari hasil keseluruhan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonieritas.

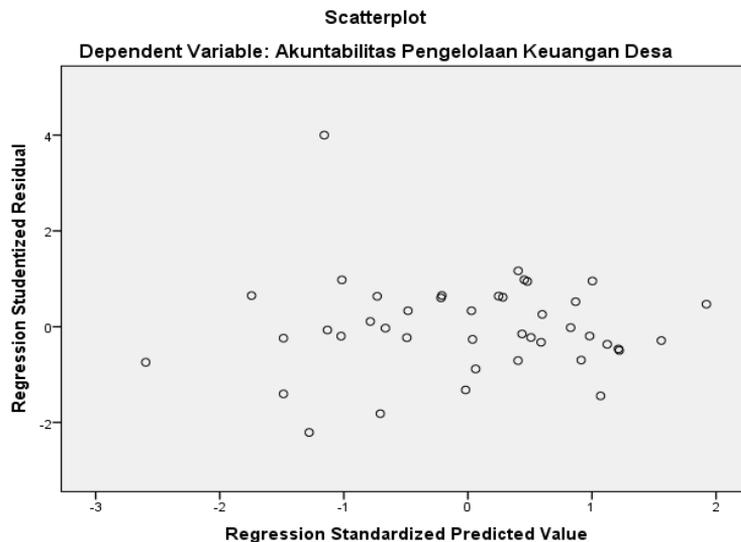
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Akan tetapi jika pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut sebagai heteroskedastisitas (Ghazali, 2013 : 139). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi

setelah diadakan regresi dengan absolut residual pada variabel dependen, sebagai berikut :

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik plot, dimana penyebaran titik-titik berbentuk acak, tidak membentuk pola tertentu serta arah penyebarannya di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik plot :

Gambar 4.4
Hasil Uji Scatterplot



Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.4 pada uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot*, dapat di lihat titik-titik

menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 dan titik-titik tidak berkumpul hanya diatas atau dibawah saja. Sehingga, berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Selain menggunakan grafik *scatterplot*, cara selanjutnya yaitu dengan uji glejser, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.19
Hasil Uji Glejser

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,833	2,078		1,363	,181
Penyajian Laporan Keuangan	-,044	,060	-,119	-,743	,462
Aksesibilitas Informasi Desa	-,148	,082	-,289	1,801	,080
Partisipasi Masyarakat	,033	,071	,070	,458	,650

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.17, hasil uji glejser diatas diketahui bahwa nilai signifikansi pada masing-masing variabel yaitu, untuk variabel penyajian laporan keuangan (X1) sebesar 0,462, variabel aksesibilitas informasi desa (X2) sebesar 0,80 dan

variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,650. Berdasarkan nilai yang telah diperoleh untuk masing-masing variabel telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikansi harus $> 0,05$. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1 Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara parsial variabel independen yaitu, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil dari uji t dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 4.20
Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,015	3,127		,325	,747
Penyajian Laporan Keuangan	,294	,090	,368	3,282	,002
Aksesibilitas Informasi Desa	,463	,124	,420	3,750	,001
Partisipasi Masyarakat	,413	,107	,410	3,850	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Dari hasil pengujian uji t di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan data pada tabel 4.18 , hasil pengolahan data untuk variabel penyajian laporan keuangan nilai t hitung diperoleh sebesar 3,282 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,024 dan nilai signifikansi sebesar 0,02 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Variabel Aksesibilitas Informasi Desa

Berdasarkan data pada tabel 4.18, hasil pengolahan data untuk variabel aksesibilitas informasi desa nilai t hitung diperoleh sebesar 3,750 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,024 dan nilai signifikansi sebesar 0,01 atau $< 0,05$. Sehingga, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas informasi desa berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. Variabel Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan data pada tabel 4.18, hasil pengolahan data untuk variabel partisipasi masyarakat nilai t hitung diperoleh sebesar 3,850 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,024 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 atau $< 0,05$. Sehingga, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel

partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4.5.2 Uji Ketepatan Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, sedangkan jika nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi R^2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.21
Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,756 ^a	,572	,538	1,795

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Desa, Penyajian Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, besarnya adjusted R^2 adalah 0,538 atau sebesar 53,8%. Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri

dari variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat dalam menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 53,8% sisanya ($100\% - 53,8\% = 46,2\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat dengan variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,015	3,127		,325	,747
Penyajian Laporan Keuangan	,294	,090	,368	3,282	,002
Aksesibilitas Informasi Desa	,463	,124	,420	3,750	,001
Partisipasi Masyarakat	,413	,107	,410	3,850	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.19 di atas, diperoleh nilai koefisien variabel bebas, penyajian laporan

keuangan (X1) sebesar 0,294, variabel aksesibilitas informasi desa (X2) sebesar 0,463 dan variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,413. Sehingga persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,015 + 0,294 X_1 + 0,463 X_2 + 0,413 X_3$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

X1 = Penyajian laporan keuangan

X2 = Aksesibilitas informasi desa

X3 = Partisipasi masyarakat

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstan sebesar 1,015, nilai tersebut menyatakan bahwa apabila variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat, jika dianggap konstan, maka nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 1,015.
2. Koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan bernilai positif sebesar 0,294. Nilai koefisien regresi tersebut berarti bahwa apabila penyajian laporan keuangan ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,294.
3. Koefisien regresi variabel aksesibilitas informasi desa bernilai positif sebesar 0,463. Nilai koefisien regresi

tersebut berarti apabila aksesibilitas informasi desa ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,463.

4. Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat bernilai positif sebesar 0,413. Nilai koefisien regresi tersebut berarti apabila partisipasi masyarakat ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,413.

4.6. Pembahasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka pembuktian hipotesis untuk variabel penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas informasi desa (X2) dan partisipasi masyarakat (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y), maka pembuktian hipotesis sebagai berikut :

4.6.1 Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pernalang, Kabupaten Pernalang

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan, data menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai sebesar 3,282 dimana lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,024 dan nilai signifikansinya diperoleh sebesar 0,02 dimana lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian tersebut berarti, apabila penyajian laporan keuangan pemerintah Desa Danasari, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang semakin baik pula, hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sehingga, apabila penyajian laporan keuangan disajikan sesuai dengan aturan yang ada, pemerintah desa dapat dikatakan telah menjaga amanah yang telah diberikan.

Konsep amanah berkaitan dalam bentuk pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas manusia yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-mu'minin ayat 8 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Konsep tersebut dalam akuntansi syariah yaitu setiap aktivitas yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, pertanggungjawaban dalam bentuk tindakan tertulis dalam akuntansi adalah penyajian laporan keuangan. Apabila penyajian laporan keuangan semakin baik maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pernalang, Kabupaten Pernalang semakin meningkat.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nuria Rahma (2017), menghasilkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Ibnu Wardana (2016), menghasilkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan penelitian oleh. Hal tersebut berarti, semakin baik penyajian laporan keuangan yang ada pada desa maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

4.6.2 Aksesibilitas informasi desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan, data menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 3,750 atau lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,024 dan nilai signifikansinya sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05.

Dari hasil yang diperoleh berarti, apabila pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, semakin dipublikasikan secara terbuka di media massa, maka masyarakat akan semakin mudah untuk memperoleh informasi desa terkait penggunaan keuangan desa secara cepat dan mudah untuk masyarakat mendapat informasi, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang akan semakin baik dan dapat dikatakan akuntabel.

Keterbukaan dalam ilmu akuntansi dapat diinterpretasikan sebagai penyampaian informasi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang telah menerima amanat dari masyarakat, maka pemerintah desa seharusnya menyampaikan amanat tersebut atau menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka, sesuai dengan yang terkandung dalam qur'an surat al-nisa ayat 4.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ema Tietien (2017) dan Faza Melia, dkk (2018), yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut berarti, semakin baik persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas pengelolaan keuangan desa, maka akan semakin baik pula persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4.6.3 Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang,

Kabupaten Pematang. Pengaruh dilihat dari nilai t hitung sebesar 3,850 atau lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,024 dan nilai signifikansinya sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05.

Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat searah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dimana semakin meningkatnya partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dari persepsi responden bahwa kepala desa menyelenggarakan kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan kegiatan melalui musyawarah.

Di dalam al-qur'an sudah dijelaskan terkait tata kelola pemerintahan yang baik. salah satunya yaitu hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan firman Allah :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Ali-Imran/3:159)

Penggalan ayat tersebut diperintahkan agar kaum muslimin bermusyawarah dalam berbagai urusan kehidupan. Dalam penelitian ini musyawarah dapat diartikan melibatkan masyarakat (partisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa partisipasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah desa seharusnya dapat melibatkan seluas mungkin partisipasi masyarakat dalam berbagai keputusan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Naimah (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa dan penelitian oleh Putri Aulia (2018) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, serta penelitian oleh Ni Komang dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Pentingnya penyajian laporan keuangan desa menurut masyarakat, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa.
2. Aksesibilitas Informasi Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Pentingnya aksesibilitas informasi desa terkait informasi pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan tepat.
3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Partisipasi masyarakat dirasakan cukup penting, sehingga masyarakat harus terlibat dalam musyawarah desa dan keterlibatan pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang telah dilakukan, tentunya masih ada kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh peneliti. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti sebanyak 42 responden dan hanya satu objek saja
2. Keterbatasan pada penggunaan variabel yang diteliti, yaitu terbatas pada penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi dan sampel yang dilakukan dan menambah objek penelitian sehingga tidak hanya satu obyek.
2. Untuk pemerintah desa Danasari, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang, terkait hasil yang diperoleh cukup tinggi pengaruh antar variabel, maka pemerintah desa harus lebih memperhatikan terkait penyajian laporan keuangan,

aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8, No.2
- Aulia, Putri. 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota*, JOM FEB, Volume 1
- Apriliana, Riska. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Surakarta : IAIN Surakarta
- Anugerah, Ellectrananda dan Wibisono, Hindrawan. 2018. *Akuntabilitas Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4, Nomor 1 Tahun
- Banga, Wempy. 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesia
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama
- Chomariyah, dkk. 2016. *Keuangan Desa Pesisir*, Malang : Inteligensia Media
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*, Jakarta : RM Books

Fawzi, Halim. *Akuntabilitas dalam Akuntansi Islam*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember

Fikrian, Hafzan. 2017. *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*, Jurnal Fakultas Ekonomi, Volume 4, No.1

Ghazali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

H. Salomi J. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*, ISSN 2302-9791, Volume 2 No.1

Hamsinar. 2017. Skripsi : *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi*, Makasar : UIN Alauddin

<https://kbbi.web.id/aksesibilitas> diakses pada tanggal 10 Mei 2019

<https://alquranmulia.wordpress.com/2016/02/08/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-58/> diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 20.42 WIB Syafiq, Ahmad. 2016. *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*. ZISWAF Volume 3, No.1

<https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi> diakses pada 15 Mei 2019

<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/22/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-anam-ayat-165/>, diakses pada tanggal 14 februari 2019

[Http://anggunsetyowati3.blogspot.com/2016/11/menjaga-amanat-adalah-bagian-dari-iman.html](http://anggunsetyowati3.blogspot.com/2016/11/menjaga-amanat-adalah-bagian-dari-iman.html) diakses pada tanggal 18 Februari 2019

Herli, M dan Hafidha. 2017., *Peran Pengawasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan di Desa*, Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi Volume vii, No.1

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, Jakarta : IAI-KASP

Ida, Nur.dkk. 2018. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Volume 1, No.1

IAI. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta : IAI

Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Saku Dana Desa* , Jakarta : Kementerian Keuangan RI

Junaidi. M dan Istighfar, Aghni. 2015. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa*, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Komang, Ni dan Gayatri. 2019. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 26, No.2

Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*, Kediri

Laila, dkk..2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu terhadap

Pencegahan Fraud yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Volume 6, edisi 12

Lily. 2015. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Volume 2, No.2

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : CV Andi Offset

Muhammadong. 2017. *Good Governance salam Perspektif Hukum Islam*, Makassar : Edukasi Mitra Grafika

Meilia F. Faza, dkk. 2018. *Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Prubalingga*, Seminar Nasional dan Call For Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8 Purwokerto

M. Sarifudin, dkk. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo*, ejournal unsrat, Volume 8, No.2

M. Nur Huda. 2019. *Tahun 2018 Per Desa Rata-rata Terima Dana Desa Rp 863 Juta*, <http://jateng.tribunnews.com/2018/01/01/tahun-2018-perdesa-rata-rata-terima-dana-desar-p-863-juta>, diakses 11 Maret 2019

Nitasari. F.P, Melisha. 2018 *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi. IAIN Surakarta

Nanang Martono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

R. Ridho dkk. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, ejurnal Volume 7, No.1

Superdi. 2017. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Fakultas Ekonomi, Volume 4, No.1

Supriadi. Edy. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal IUS Volume 3, No.8

Sujarweni , V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang : Setara Press

Suryani dan Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif*, Jakarta : Prenadamedia Group

Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Yuliani, Nur Laila. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Volume 24 No. 1

Yulisa, Rahmah. 2014. *Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah dilembaga Bisnis Syariah*, JESTT Vol.1 No.7, Surabaya : Universitas Airlangga

Zuryani, Nasrina dkk. 2016. *Akuntabilitas Partai Politik* , Bali: Udayana University Press

Lampiran 1 Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu Responden
Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Peneliti akan mengadakan penelitian di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang”**.

Dengan ini, memohon kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini dengan memberikan informasi pada masing masing pernyataan berikut ini dengan sebenar-benarnya dan jujur sesuai petunjuk pengisian. Jawaban yang saudara berikan akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Data yang saudara berikan hanya untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk di publikasikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Semarang, Juni 2019
Hormat Saya

Tri Yuli Astuti

A. Identitas Responden

1. No. Responden:
2. Nama : (boleh tidak diisi)
3. Usia : Tahun
4. Jenis Kelamin : Pria / Wanita
5. Tingkat Pendidikan : SD SMP SMA/SMK
D3 S1
Lain-lain
6. Jabatan :
7. Masa Kerja : < 1 Tahun 1-5 Tahun
5-10 Tahun > 10 Tahun
8. Nama Desa :

B. Petunjuk Pengisian

Mohon bantuan bapak / ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan memberi tanda checklist (✓) untuk kuesioner dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Keterangan Jawaban :

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju

Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1)

No	PERNYATAAN	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Pemerintah Desa menyajikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan pertanggungjawaban					
2.	Pemerintah Desa menyajikan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan					
3.	Informasi tentang keuangan desa Danasari telah disajikan tepat waktu					
4.	Penyajian tentang pengelolaan keuangan dana desa Danasari disajikan secara lengkap					
5.	Penyajian Laporan Keuangan Desa Danasari telah disajikan secara jujur dan wajar					
6.	Informasi bahwa penyajian pengelolaan keuangan desa					

	Danasari telah disajikan secara konsisten dan tidak ditutup-tutupi					
7.	Penyajian Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan bahasa yang mudah dan dapat dipahami					

Variabel Aksesibilitas Informasi Desa (X2)

No	PERNYATAAN	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Informasi desa mengenai pengelolaan keuangan dana desa disajikan dengan jujur dan secara terbuka (tidak ada yang ditutup-tutupi)					
2.	Semua stakeholder (Masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pihak yang berkepentingan) diberikan kemudahan untuk mengetahui informasi desa mengenai pengelolaan keuangan desa					

3.	Informasi desa terkait pengelolaan dana desa dapat diakses melalui media, surat kabar atau internet (<i>website</i>)					
----	--	--	--	--	--	--

Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)

No	PERNYATAAN	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan program-program desa					
2.	Masyarakat dapat mengusulkan rencana anggaran yang akan digunakan					
3.	Masyarakat terlibat dalam rapat pari purna					
4.	Masyarakat terlibat dalam hal mengawasi dan melaporkan penggunaan dana desa					
5.	Masyarakat dapat memberikan					

	penilaian terkait pelaksanaan anggaran					
--	--	--	--	--	--	--

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	PERNYATAAN	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Penyusunan anggaran pemerintah desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku					
2.	Laporan Pengelolaan Keuangan Dana Desa digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik					
3.	Laporan pengelolaan keuangan desa Danasari bersifat terbuka, cepat dan tepat					
4.	Masyarakat tidak perlu tahu mengenai laporan pengelolaan keuangan desa Danasari, karena merupakan barang					

	rahasia					
5.	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban anggaran Desa Danasari diawasi secara berkelanjutan					

Lampiran 2 Deskripsi Responden

Jenis Kelamin

		Jenis_Kelamin	Usia	Pendidikan	Jabatan
N	Valid	42	42	42	42
	Missing	0	0	0	0

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30-40	11	26,2	26,2	26,2
	40-50	16	38,1	38,1	64,3
	> 50	15	35,7	35,7	100,0
Total		42	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	10	23,8	23,8	23,8
	SMP	11	26,2	26,2	50,0
	SMA/SMK	19	45,2	45,2	95,2
	5	2	4,8	4,8	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kepala Dusun	4	9,5	9,5	9,5
	RT	21	50,0	50,0	59,5
	RW	8	19,0	19,0	78,6
	BPD	9	21,4	21,4	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

Lampiran 3 Hasil Uji Deskriptif Jawaban Responden

Statistics

		Penyajian Laporan Keuangan	Aksesibilitas Informasi Desa	Partisipasi Masyarakat	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
N	Valid	42	42	42	42
	Missing	0	0	0	0
Mean		24,86	8,02	20,17	20,38
Std. Deviation		3,302	2,394	2,622	2,641
Minimum		20	3	14	14
Maximum		32	12	25	25
Sum		1044	337	847	856

Lampiran 4 Jawaban Responden

No	Penyajian Laporan Keuangan (X1)							Aksesibilitas Informasi Desa (X2)				Partisipasi Masyarakat (X3)					Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)							
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	TOTAL	A1	A2	A3	TOTAL	P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL	A1	A2	A3	A4	A5	TOTAL
1	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	3	1	5	5	5	4	4	2	5	5	5	4	5	2
2	4	4	2	3	4	2	2	2	2	2	2	6	5	4	4	2	4	1	4	4	2	2	2	1
3	5	4	1	4	3	2	3	2	2	2	1	5	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	2
4	4	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	1	4	4	3	3	1	5	5	4	4	3	4	2
5	5	5	3	3	3	2	3	2	3	3	2	8	5	5	5	5	2	5	5	5	4	4	5	2
6	4	4	4	3	4	4	3	2	4	3	3	1	5	5	5	4	2	3	5	5	5	2	5	2
7	3	3	2	4	4	3	5	2	4	2	2	6	5	5	5	5	2	5	5	5	3	2	5	2
8	4	3	2	4	4	3	4	2	4	3	2	8	4	4	4	2	1	4	4	4	4	3	4	1
9	5	5	4	4	3	3	4	2	4	4	3	1	4	4	4	3	1	5	5	3	3	5	2	
10	3	2	2	3	4	4	3	2	4	1	1	6	4	4	4	3	1	4	3	3	2	3	5	1
11	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	1	3	3	3	2	1	5	5	4	4	4	5	2
12	4	4	4	3	3	2	4	2	4	3	1	8	5	5	4	3	2	5	4	4	4	4	5	2
13	4	4	4	3	3	4	3	2	5	3	2	1	6	5	4	4	2	5	4	4	4	3	4	2
14	5	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1	3	4	3	3	2	1	4	3	2	1	4	4	1
15	4	4	4	4	3	2	3	2	4	2	2	6	5	5	5	3	2	5	5	4	2	5	1	2
16	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	2
17	5	5	3	3	3	2	3	2	4	3	3	9	5	4	4	4	2	5	5	5	3	5	3	2

1	8	4	4	2	3	4	4	2	3	2	3	2	7	5	5	5	4	5	2	5	5	5	2	5	2	2	
1	9	4	4	3	3	4	4	3	5	4	2	2	8	5	5	4	2	4	2	0	4	4	4	2	4	8	
2	0	5	4	4	4	3	3	3	2	6	4	2	3	9	5	5	5	4	4	2	5	5	4	3	5	2	
2	1	4	4	2	3	4	4	4	2	5	3	3	1	7	4	4	3	3	4	1	8	5	5	3	2	4	9
2	2	4	4	3	5	5	5	5	3	1	4	4	2	0	4	4	4	4	3	1	9	5	5	5	2	5	2
2	3	5	5	4	4	3	3	3	2	7	4	4	1	9	5	5	4	3	3	2	0	4	5	5	3	4	1
2	4	5	4	3	3	5	5	3	2	8	4	4	4	2	5	5	4	3	4	1	5	5	4	4	5	3	2
2	5	4	3	2	3	4	3	2	1	4	1	1	6	4	4	3	3	4	1	8	4	4	3	3	3	7	1
2	6	5	4	4	4	4	4	3	2	8	4	3	2	9	5	5	5	4	3	2	4	4	4	4	4	0	2
2	7	4	4	4	3	4	3	4	2	6	3	3	2	8	5	4	3	2	3	1	7	4	4	4	3	4	9
2	8	3	3	3	3	3	2	4	1	2	1	1	4	4	4	4	3	4	1	9	5	4	4	1	4	8	1
2	9	4	4	2	4	4	3	3	4	1	1	1	3	5	5	5	5	3	2	3	4	3	3	2	4	6	1
3	0	3	4	3	3	3	3	2	1	4	3	3	0	5	4	4	4	4	2	1	4	4	4	3	4	9	1
3	1	5	5	4	4	5	5	4	3	2	4	2	2	8	3	4	5	3	3	1	8	5	5	4	4	4	2
3	2	4	4	4	4	4	3	4	2	7	2	2	2	6	4	3	3	3	3	1	6	5	4	4	2	5	0
3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	4	4	3	1	5	4	3	3	4	1	9	5	5	4	2	5	1	2
3	4	5	5	3	5	5	5	4	3	2	4	2	2	8	4	4	5	3	5	2	1	5	5	4	4	4	2
3	5	5	5	4	4	4	4	4	0	2	1	1	4	4	4	4	4	4	2	0	4	4	4	4	5	1	2
3	6	4	5	4	4	4	4	4	2	9	4	4	2	0	4	4	4	3	4	1	9	5	5	4	4	4	2
3	7	4	3	2	3	4	2	3	1	4	4	1	9	4	5	5	4	4	2	2	5	4	3	3	5	0	2
3	8	5	4	2	2	3	3	3	2	4	1	1	6	5	5	3	2	4	1	9	4	4	4	2	4	8	1
3	9	4	4	3	3	4	3	2	3	4	3	4	1	5	4	4	3	5	2	1	5	5	4	4	3	1	2

4								2								1					1			
0	5	3	3	3	2	2	3	1	4	2	2	8	3	4	3	4	4	8	4	4	3	3	4	8
4								2								1								2
1	3	4	2	3	3	3	2	0	3	3	3	9	4	4	4	2	5	9	5	5	3	2	5	0
4								2									2							2
2	4	4	4	3	3	3	3	4	2	4	2	8	5	5	5	3	5	3	5	5	4	4	5	3

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas

Penyajian Laporan Keuangan

		PLK1	PLK2	PLK3	PLK4	PLK5	PLK6	PLK7	TOTAL
PLK1	Pearson Correlation	1	,431**	,220	,249	,031	,075	,060	,444**
	Sig. (2-tailed)		,004	,162	,112	,847	,638	,706	,003
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
PLK2	Pearson Correlation	,431**	1	,490**	,208	,014	,268	,176	,603**
	Sig. (2-tailed)	,004		,001	,186	,931	,086	,265	,000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
PLK3	Pearson Correlation	,220	,490**	1	,240	-,076	,246	,357*	,615**
	Sig. (2-tailed)	,162	,001		,126	,632	,116	,020	,000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
PLK4	Pearson Correlation	,249	,208	,240	1	,397**	,321*	,528**	,662**
	Sig. (2-tailed)	,112	,186	,126		,009	,038	,000	,000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
PLK5	Pearson Correlation	,031	,014	-,076	,397**	1	,694**	,285	,543**
	Sig. (2-tailed)	,847	,931	,632	,009		,000	,067	,000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
PLK6	Pearson Correlation	,075	,268	,246	,321*	,694**	1	,327*	,713**
	Sig. (2-tailed)	,638	,086	,116	,038	,000		,034	,000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
PLK7	Pearson Correlation	,060	,176	,357*	,528**	,285	,327*	1	,660**
	Sig. (2-tailed)	,706	,265	,020	,000	,067	,034		,000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
TOTAL	Pearson Correlation	,444**	,603**	,615**	,662**	,543**	,713**	,660**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	42	42	42	42	42	42	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Aksesibilitas Informasi Desa

		AID1	AID2	AID3	TOTAL
AID1	Pearson Correlation	1	,459**	,380*	,758**
	Sig. (2-tailed)		,002	,013	,000
	N	42	42	42	42
AID2	Pearson Correlation	,459**	1	,552**	,850**
	Sig. (2-tailed)	,002		,000	,000
	N	42	42	42	42
AID3	Pearson Correlation	,380*	,552**	1	,795**
	Sig. (2-tailed)	,013	,000		,000
	N	42	42	42	42
TOTAL	Pearson Correlation	,758**	,850**	,795**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	42	42	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Partisipasi Masyarakat

		PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	TOTAL
PM1	Pearson Correlation	1	,650**	,360*	,228	,348*	,670**
	Sig. (2-tailed)		,000	,019	,146	,024	,000
	N	42	42	42	42	42	42
PM2	Pearson Correlation	,650**	1	,666**	,447**	,297	,816**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,003	,056	,000
	N	42	42	42	42	42	42
PM3	Pearson Correlation	,360*	,666**	1	,572**	,319*	,813**
	Sig. (2-tailed)	,019	,000		,000	,040	,000
	N	42	42	42	42	42	42
PM4	Pearson Correlation	,228	,447**	,572**	1	,240	,731**
	Sig. (2-tailed)	,146	,003	,000		,125	,000
	N	42	42	42	42	42	42
PM5	Pearson Correlation	,348*	,297	,319*	,240	1	,600**
	Sig. (2-tailed)	,024	,056	,040	,125		,000
	N	42	42	42	42	42	42
TOTAL	Pearson Correlation	,670**	,816**	,813**	,731**	,600**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	42	42	42	42	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

	APKD1	APKD2	APKD3	APKD4	APKD5	TOTAL
APKD1 Pearson Correlation	1	,725**	,353*	,219	,583**	,703**
Sig. (2-tailed)		,000	,022	,163	,000	,000
N	42	42	42	42	42	42
APKD2 Pearson Correlation	,725**	1	,523**	,380*	,473**	,801**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,013	,002	,000
N	42	42	42	42	42	42
APKD3 Pearson Correlation	,353*	,523**	1	,399**	,472**	,765**
Sig. (2-tailed)	,022	,000		,009	,002	,000
N	42	42	42	42	42	42
APKD4 Pearson Correlation	,219	,380*	,399**	1	,190	,683**
Sig. (2-tailed)	,163	,013	,009		,228	,000
N	42	42	42	42	42	42
APKD5 Pearson Correlation	,583**	,473**	,472**	,190	1	,706**
Sig. (2-tailed)	,000	,002	,002	,228		,000
N	42	42	42	42	42	42
TOTAL Pearson Correlation	,703**	,801**	,765**	,683**	,706**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
N	42	42	42	42	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	42	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	42	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,714	,715	7

Variabel Aksesibilitas Informasi Desa

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	42	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	42	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,722	,721	3

Variabel Partisipasi Masyarakat

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	42	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	42	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,767	,778	5

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	42	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	42	100,0

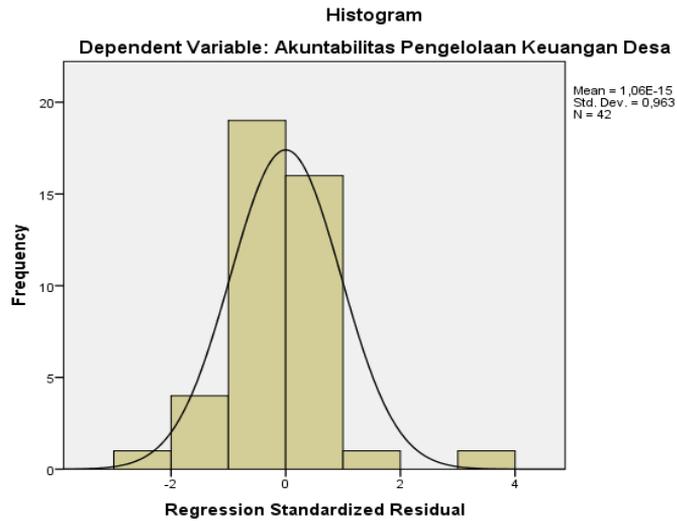
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

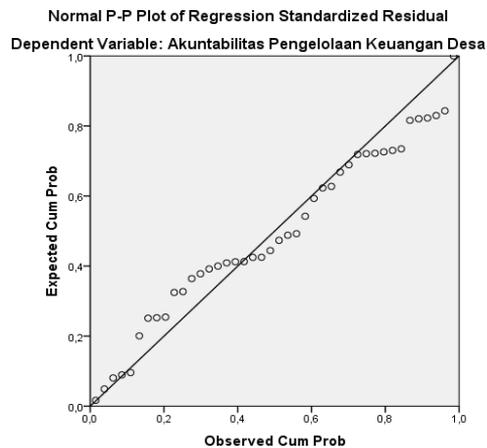
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,751	,792	5

Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik

Histogram Uji Normalitas



Uji Normalitas Grafik Plot



Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,72818236
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,124
	Negative	-,104
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,107 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 8 Hasil Uji Multikolonieritas

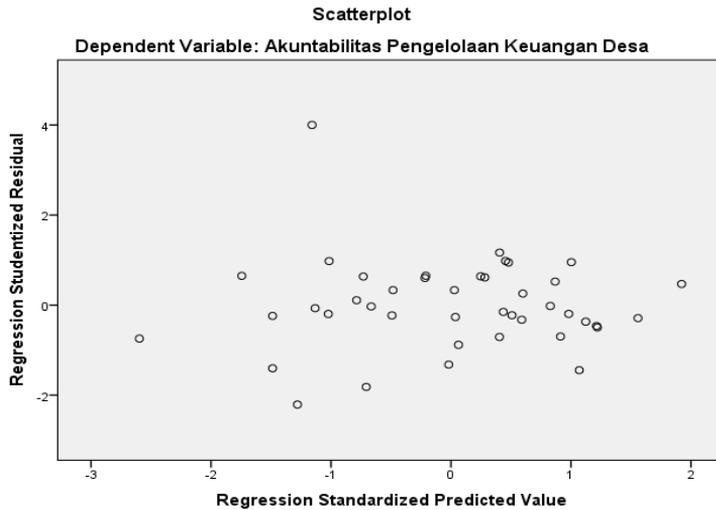
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,015	3,127		,325	,747		
Penyajian Laporan Keuangan	,294	,090	,368	3,282	,002	,896	1,116
Aksesibilitas Informasi Desa	,463	,124	,420	3,750	,001	,898	1,114
Partisipasi Masyarakat	,413	,107	,410	3,850	,000	,993	1,007

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Scatterplot



Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,833	2,078		1,363	,181
Penyajian Laporan Keuangan	-,044	,060	-,119	-,743	,462
Aksesibilitas Informasi Desa	-,148	,082	-,289	-1,801	,080
Partisipasi Masyarakat	,033	,071	,070	,458	,650

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 10 Analisis Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Desa, Penyajian Laporan Keuangan ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,756 ^a	,572	,538	1,795

- a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Desa, Penyajian Laporan Keuangan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	163,454	3	54,485	16,908	,000 ^b
	Residual	122,451	38	3,222		
	Total	285,905	41			

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Desa, Penyajian Laporan Keuangan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	1,015	3,127		
Penyajian Laporan Keuangan	,294	,090	,368	3,282	,002
Aksesibilitas Informasi Desa	,463	,124	,420	3,750	,001
Partisipasi Masyarakat	,413	,107	,410	3,850	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 11 Dokumentasi Responden



Lampiran 12 Surat Keterangan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
website : febi.walisongo.ac.id - Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : B-1723/10.5/D1/TL.00/06/2019 24 Juni 2019
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Izin Riset

Yth.
Kepala Desa Danasari Pemalang
Jl. Rajawali No.45 Danasari Pemalang

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama : Tri Yli Astuti
NIM/Program/Smt : 1505046034 / S.1 / VIII
Jurusan : Akuntansi Syariah
Alamat : Jl. Kutilang Rt.04 Rw.03 Widuri Pemalang
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Akuntansi Syariah Program S.1
Judul Skripsi : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Danasari Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)
Waktu Research : 24 Juni 2019 sampai selesai
Lokasi Penelitian : Desa Danasari Kec. Pemalang

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data yang bersangkutan

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Tri Yuli Astuti

Tempat & Tgl.Lahir : Pemalang, 1 Juli 1996

Agama : Islam

Alamat : Jalan Kutilang RT. 04 RW. 03 Kelurahan
Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten
Pemalang

No. Telepon : 085941313032

Email : triyuliasuti01@gmail.com

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan Formal :

No	Pendidikan	Tahun
1.	SD Negeri 01 Widuri	2005
2.	SMP Negeri 1 Pemalang	2011
3.	SMK Negeri 1 Pemalang	2014
4.	UIN Walisongo Semarang	2015 - Selesai